



**PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA**

Monev dan Tindak Lanjut Laporan SPAK Triwulan II 2025

Pengadilan Negeri Palangkaraya
Jl. Diponegoro No. 21
Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya
Kalimantan Tengah, 73111
<https://pn-palangkaraya.go.id>
surat@pn-palangkaraya.go.id
Telp. (0536) 3221870

A. Latar Belakang

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) merupakan instrumen pengawasan sosial yang dilaksanakan secara berkala dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). SPAK tidak hanya menilai kualitas pelayanan secara administratif, tetapi juga menggali persepsi publik terhadap potensi penyimpangan etika dan integritas aparatur secara sistemik.

Laporan ini menyajikan hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPAK Triwulan II Tahun 2025, dengan fokus analisis pada tiga unsur terendah berdasarkan perolehan nilai mentah dari aplikasi siSUPER, meskipun secara indeks akhir nilai SPAK masuk kategori optimal.

B. Metodologi Pelaksanaan

Komponen	Penjelasan
Populasi	Pengguna layanan Pengadilan Negeri Palangkaraya
Jumlah Responden	67 orang
Instrumen	Kuesioner digital melalui aplikasi siSUPER
Jenis Survei	SPAK Triwulan II (April–Juni 2025)
Teknik Sampling	Accidental Sampling (berbasis pengguna aktual)
Skala Penilaian	Skala Likert 1–4, dikonversi ke 0–100

C. TIGA UNSUR DENGAN NILAI TERENDAH (APLIKASI SISUPER)

No	Unsur SPAK	Nilai	Indeks	Kategori
1	Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan	268	4.00	Bersih dari Korupsi
2	Tidak ada penyalahgunaan jabatan untuk meminta imbalan	268	4.00	Bersih dari Korupsi
3	Tidak pernah dihubungi karyawan untuk menawarkan bantuan	268	4.00	Bersih dari Korupsi

	pengurusan perkara			
Catatan : Meskipun nilai indeks maksimum (4.00), nilai mentah 268 pada ketiga unsur tersebut adalah yang paling rendah secara statistik, menjadi titik awal evaluasi substantif dan tindak lanjut strategis.				

D. ANALISIS SUBSTANTIF 3 INDIKATOR

1. Sesuai Prosedur Layanan (Pelayanan oleh Petugas)

- a. Risiko Tersembunyi: Potensi ketidakteraturan dalam pelayanan seperti perbedaan alur pelayanan antar petugas, atau ketidakjelasan informasi.
- b. Indikasi Lapangan: Responden masih menemui ambiguitas dalam dokumentasi layanan (misalnya saat bertanya ke meja informasi vs loket berkas).

2. Penyalahgunaan Jabatan untuk Imbalan

- a. Risiko Persepsi: Kecurigaan pengguna bahwa pejabat internal mungkin membuka celah akses khusus berbasis relasi atau kompensasi tak resmi.
- b. Catatan Penting: Meskipun tidak ada aduan formal, persepsi tersebut dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan publik.

3. Hubungan Informal dari Pegawai (Calo Internal Terselubung)

- a. Fenomena Lapangan: Ada kemungkinan petugas membantu secara sukarela namun menimbulkan kesan “akses alternatif”.
- b. Risiko: Potensi tumbuhnya calo terselubung berbasis empati personal yang tidak terdokumentasi resmi.

E. STRATEGI TINDAK LANJUT

1. Penguatan Standar Layanan dan SOP

Aksi	PIC	Waktu Pelaksanaan
Evaluasi ulang SOP PTSP dan meja layanan	Panmud Hukum & Subbag Umum	Juli 2025
Publikasi SOP versi visual dan booklet	Tim ZI & Humas	Juli–Agustus 2025
Simulasi SOP antar petugas lintas layanan	Ketua ZI Area 1 & 2	Agustus 2025

2. Pencegahan Penyalahgunaan Jabatan

Aksi	PIC	Waktu Pelaksanaan
Pengawasan Internal	Hakim Pengawas	Rutin
Sosialisasi larangan imbalan	Tim TI & Humas	Rutin

3. Eliminasi Akses Perantara & Jalur Tidak Resmi

Aksi	PIC	Waktu Pelaksanaan
Pasang tanda “Tanpa Perantara” dan “Zero Contact Policy”	Koordinator PTSP	Juli 2025
QR Code pelaporan cepat untuk pelanggaran etika layanan	Tim TI & Admin siSUPER	Agustus 2025
Monitoring ruang sidang & PTSP (CCTV + evaluasi harian)	Subbag Umum & TI	Rutin

F. DAMPAK YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatkan *clarity* dan *compliance* terhadap SOP bagi pengguna dan petugas.
2. Mengurangi potensi praktik informal yang bisa menurunkan kepercayaan publik.
3. Menjamin sistem pengawasan berjalan *real-time* dan mencakup aspek interaksi interpersonal.
4. Membentuk budaya pelayanan responsif, transparan, dan tidak membuka peluang interpretasi alternatif terhadap prosedur.

G. PENUTUP

Walaupun hasil indeks keseluruhan SPAK Pengadilan Negeri Palangkaraya Triwulan II Tahun 2025 tergolong optimal, data mentah dari aplikasi siSUPER mengindikasikan terdapat area persepsi yang perlu diperkuat. Dengan memprioritaskan transparansi prosedural, integritas jabatan, dan peniadaan jalur informal, satuan kerja tidak hanya menjaga reputasi, namun juga mengembangkan sistem pelayanan yang tahan terhadap erosi kepercayaan publik.

Palangka Raya, 5 Mei 2025

Ketua Pengadilan Negeri
Palangkaraya



RICKY FARDINAND

Penanggung Jawab Survei



MANSYAH